

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MELAKUKAN PEMBAYARAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI
KECAMATAN PALARAN
KOTA SAMARINDA**

Prisma Anugrah¹

Abstrak

Prisma Anugrah. Partisipasi masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di kecamatan palaran kota samarinda, di bawah bimbingan Dr.Muhammad Noor,M.Si selaku pembimbing I dan Drs. Endang Erawan M.Si selaku pembimbing II.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di kecamatan palaran kota samarinda serta faktor-faktor pendukung dan penghambat. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dan pengambilan sumber data primer dengan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan tiga cara yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknis analisis data yang digunakan yaitu model interaktif yang terdiri dari pengumpulan data, penyederhanaan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Temuan dari penelitian ini diketahui bahwa dalam membayar pajak bumi dan bangunan untuk di kecamatan palaran sudah cukup baik dari tahun sebelumnya tetapi memang ada beberapa wajib pajak yang sering terlambat sehingga mereka terkena denda yang sudah di tetapkan oleh pihak dispenda, untuk target dan realisasi itu sendiri memang tidak menentu pencapaiannya di sebabkan oleh faktor penghambat yaitu minimnya kesadaran masyarakat akan penting membayar pajak secara rutin sehingga mereka terkena denda yang telah di tetapkan pihak dispenda

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

PENDAHULUAN

Pajak adalah salah satu komponen pendapatan bagi pembangunan bangsa, pajak digunakan untuk pembangunan dan untuk diberikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk subsidi berdasarkan kenyataan, pemerintah berusaha untuk mengatur/menetapkan besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh masyarakat melalui departemen dalam negeri

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, Email: prismaanugrah@gmail.com

Sesuai dengan pasal 23 undang – undang 1945 sebagai dasar hukum pemungutan pajak oleh Negara dinyatakan bahwa “Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan Negara di atur oleh undang-undang”.pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang memiliki nilai penting untuk pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional maupun daerah

Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam pembangunan nasional khususnya dalam melakukan pembayaran pajak karena pajak sebagai salah satu sumber penerimaan dalam negeri merupakan sektor yang potensial, karena dengan jumlah penduduk yang begitu besar dan wilayah yang begitu luas, maka Indonesia memiliki sumber-sumber pajak yang sangat banyak. Penerimaan dari sektor pajak ini selanjutnya dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana kepentingan umum. Dengan kata lain, pendapatan Negara dari sektor pajak ini merupakan “motor penggerak” kehidupan ekonomi masyarakat yang merupakan sarana nyata bagi pemerintah untuk mampu menyediakan berbagai sarana dan prasarana kepentingan umum.

Menurut Peraturan Daerah Kota Samarinda No.04 Tahun 2011 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah,Bumi dan bangunan merupakan salah satu sumber pajak di antara sumber-sumber pajak lainnya, dimana bumi dan bangunan memberikan keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai hak atasnya atau memperoleh manfaat darinya. Karenanya bagi masyarakat yang memperoleh manfaat dari bumi dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, akan mendapat suatu hak dari kekuasaan negara. Maka masyarakat wajar menyerahkan, sebagian dari kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui pembayaran pajak.

Pajak bumi dan bangunan merupakan pajak langsung yang dipungut oleh pemerintah pusat, namun hasil penerimaannya ditujukan untuk kepentingan masyarakat di daerah yang bersangkutan dengan letak objek pajak tersebut, sehingga sebagian besar hasil penerimaan tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah. Penggunaan pajak tersebut kepada daerah diharapkan dapat merangsang masyarakat untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak, yang sekaligus mencerminkan sifat Partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan.

Adanya sebagian besar masyarakat yang tidak memenuhi kewajibannya membayar Pajak Bumi dan Bangunan otomatis merupakan hambatan dalam pemungutan pajak. Adanya sebagian besar masyarakat yang tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar Pajak Khususnya Pajak Bumi dan Bangunan, bukanlah merupakan usaha nyata dari masyarakat, yang kurang berpartisipasi dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak khususnya pajak bumi dan bangunan mungkin karena kurangnya sosialisasi tentang cara membayar pajak yang berbelit-belit atau masyarakat sendiri masih kurang paham tentang pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan secara rutin setiap tahunnya

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang masalah tersebut diatas,maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah partisipasi masyarakat di kecamatan palaran kota samarinda dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan ?
2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat partisipasi masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan di kecamatan palaran kota samarinda ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan

1.4 Manfaat penelitian

Manfaat penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan. Jika tujuan penelitian dapat tercapai dan rumusan masalah dapat terjawab secara akurat maka penelitian yang dilakukan mempunyai manfaat baik. Adapun penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat sebagai berikut :

1. Praktis
 - a. Sebagai bahan masukan bagi semua pihak terkait khususnya pemerintah kota samarinda sebagai dasar untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak khususnya pajak bumi dan bangunan
 - b. Secara praktis, diharapkan sebagai referensi atau masukan bagi dinas pendapatan daerah untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
- 2 Teoritis
 - a. Sebagai sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Administrasi Negara

Partisipasi

Kata partisipasi berasal dari bahasa inggris yaitu "*participation*", kata ini sebenarnya berasal dari bahasa latin yaitu "*participatio*", yang berarti mengambil bagian. Kata "*participatio*", berasal dari kata kerja "*participare*", yang mengandung pengertian ikut serta, sehingga partisipasi mengandung pengertian turut ambil bagian atau ikut serta.

Menurut Ishomuddin (2001:165) Partisipasi dalam arti sederhana adalah keikutsertaan atau keterlibatan seseorang atau kelompok di dalam suatu kegiatan. Keikutsertaan seseorang atau kelompok di dalam pelaksanaan suatu kegiatan yang dilakukan secara sengaja dan ikut bertanggung jawab akan turut menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut.

Ada berbagai pendapat tentang partisipasi, partisipasi menurut Uphoff (1992:40) mengatakan bahwa partisipasi adalah masyarakat untuk terlibat dalam proses pembuatan keputusan, dalam pelaksanaan kegiatan ikut menikmati hasil dari kegiatan tersebut dan ikut serta dalam mengevaluasi.

Bentuk Partisipasi Masyarakat

Ada beberapa bentuk partisipasi yang dapat diberikan masyarakat dalam suatu program pembangunan, yaitu partisipasi uang, partisipasi harta benda, partisipasi tenaga, partisipasi buah pikiran, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan partisipasi representatif.

Dengan berbagai bentuk partisipasi yang telah disebutkan diatas, maka bentuk partisipasi dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk nyata (memiliki wujud) dan juga bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk tidak nyata (abstrak). Bentuk partisipasi yang nyata misalnya uang, harta benda, tenaga sedangkan bentuk partisipasi yang tidak nyata adalah partisipasi buah pikiran, pengambilan keputusan dan partisipasi representatif. Adapun beberapa pendapat tentang bentuk-bentuk partisipasi masyarakat, antara lain:

Menurut Cohen and Uphoff (dalam Nogi 2005:323) mengemukakan adanya beberapa bentuk partisipasi, antara lain :

- a. Partisipasi dalam atau kontak dengan pihak lain sebagai titik awal pelaksanaan aktivitas tersebut
- b. Partisipasi dalam memperlihatkan atau menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima, mengiyakan, menerima dengan syarat, maupun dalam arti menolaknya.
- c. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termasuk pengambilan keputusan, baik bersifat politis yang menyangkut kepentingan mereka maupun dalam hal yang bersifat teknis.
- d. Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan.
- e. Partisipasi dalam menerima pembangunan, yaitu keterlibatan anggota masyarakat dalam menilai sejauh mana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan sejauh mana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Menurut Holil (dalam Isbandi, 2007:21) mengemukakan adanya beberapa bentuk partisipasi, antara lain:

- a. Partisipasi dalam bentuk tenaga adalah partisipasi masyarakat yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program.
- b. Partisipasi dalam bentuk uang adalah bentuk partisipasi masyarakat yang diberikan untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian suatu program pembangunan. Partisipasi ini dapat berupa sumbangan berupa uang tetapi tidak dipaksakan yang diberikan oleh sebagian atau seluruh masyarakat untuk suatu kegiatan atau program pembangunan.

- c. Partisipasi dalam bentuk harta benda adalah partisipasi masyarakat yang diberikan dalam bentuk menyumbang harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja atau perkakas.

PAJAK

Soemitro (dalam Mardiasmo 2004 :1) memberikan defenisi bahawa pajak adalah iuran rakyat kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sejalan dengan hal itu pajak adalah iuran kepada kas Negara (yang dapat dipaksakan) oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang digunakan adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum.

Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional adalah suatu abstraksi dari kejadian yang menjadi sasaran penelitian dan juga memberi batasan tentang luasnya ruang lingkup penelitian. Di dalam penelitian ini digunakan suatu definisi konsepsional yaitu Partisipasi masyarakat Dalam Membayar pajak bumi dan bangunan adalah keikutsertaan setiap warga negarasecara aktif dimana dibutuhkan kesadaran dan tanggung jawab serta ketepatan waktu masyarakat dalam membayar pajak berupa pajak bumi dan bangunan yang di sesuaikan berdasarkan luas tanah dari wajib pajak yang bersangkutan.

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran tentang deskripsi atau suatu keadaan secara subyektif atau obyektif penelitian seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya.

3.2 Fokus penelitian

Sesuai dengan tujuan pengujian hipotesis mengenai deskriptif atau penggambarantentang Partisipasi masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di kecamatan palaran kota samarinda maka indikator – indikator yang akan di teliti adalah :

1.
 - a. Ketepatan Waktu Membayar Pajak
 - b. Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kota Samarinda 2013 - 2015
2. Faktor penghambat dan pendukung Partisipasi masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di kecamatan palaran kota samarinda.

3.3 Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kantor dinas pendapatan kota samarinda dan di kecamatan palaran kota samarinda.

3.4 Sumber Data

Dalam suatu penelitian, sumber data sangat diperlukan untuk melengkapi pendeskripsian penelitian, dimana keseluruhan data tersebut perlu penjelasan dari mana asal sumber tersebut. Sumber data penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh melalui narasumber dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung kepada informan dan dipandu melalui pertanyaan yang sesuai dengan fokus penelitian yang dipersiapkan sebelumnya oleh peneliti bagi informan.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui beberapa sumber informasi, antara lain:
 1. Dokumen-dokumen yang menjadi obyek penelitian.
 2. Buku-buku ilmiah, hasil penulisan yang relevan dengan penelitian ini.

Dalam menentukan *Key informan* dan *informan* dilakukan dengan metode *Purposive Sampling*. Seperti yang telah dikemukakan Sugiyono (2013 : 53-54) *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti

Jumlah *informan* dalam penelitian kualitatif tidak ditentukan, dalam hal ini peneliti melakukan penggalian data melalui wawancara mendalam dari satu *informan* lainnya dan seterusnya sampai peneliti tidak menemukan informasi baru lagi. Dengan kata lain, bilamana dalam dalam proses pengumpulan data sudah tidak menemukan variasi informasi, maka peneliti tidak perlu lagi mencari informasi baru, proses pengumpulan informasi dianggap sudah selesai. Dengan demikian pada penelitian kualitatif tidak dipersoalkan jumlah sampel.

Dalam hal ini yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah:

- a. *Key informan* atau informasi kunci adalah kepala bagian pengendalian dan evaluasi dinas pendapatan daerah kota samarinda.
- b. Sedangkan *Informan* adalah Staff/pegawai di bidang Pengendalian serta wajib pajak yang tidak membayar pajak bumi dan bangunan sebanyak 5 orang

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk penulisan skripsi ini, penulis dalam mengumpulkan data menggunakan beberapa cara atau teknik sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku – buku sebagai bahan referensi.

2. Penelitian Lapangan (*Field Work Research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangan dengan menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:
 - a. Observasi, yaitu pengamatan langsung dilapangan.
 - b. Wawancara, yaitu mengadakan wawancara untuk melengapi keterangan-keterangan yang berkaitan dengan penelitian.
 - c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data berdasarkan dokumentasi-dokumentasi yang ada sebagai sumber data

2.5 Teknik Analisis Data

Menurut sugiyono (2012:50) menyatakan bahwa analisis data adalah proses pencarian dan pengaturan secara sistematis hasil wawancara, catatan-catatan dan bahan-bahan yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan. Analisis data kualitatif adalah mencakup penelusuran data melalui catatan-catatan untuk menemukan pola-pola yang dikaji oleh peneliti. Miles dan Huberman (dalam sugiyono 2012 : 90) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian. Dari uraian yang telah dikemukakan di atas maka analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu analisis data model interaktif yang meliputi empat komponen sebagai berikut :

1. Pengumpulan data merupakan data mentah yang di kumpulkan dalam proses yang berlangsung sepanjang penelitian dengan menggunakan seperangkat instrument yang telah disiapkan guna memperoleh informasi. Dalam proses pengumpulan data ini seorang peneliti dapat melakukan analisis secara langsung sesuai dengan informasi data yang diperoleh di lapangan.
2. Reduksi data ialah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.
3. Display data adalah hasil data yang telah terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan yang akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Dalam penelitian kualitatif display data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.

Verifikasi/menarik kesimpulan merupakan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan baru dapat berupa deskripsi atau

gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori

Ketepatan waktu masyarakat di Kecamatan Palaran Kota Samarinda dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Ketepatan waktu dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu indikator partisipasi masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak khususnya pajak bumi dan bangunan karena dengan membayar secara tepat waktu dari waktu yang telah di tetapkan maka masyarakat juga mempunyai kesadaran dan ikut bertanggung jawab dalam pembangunan daerahnya

Untuk di kecamatan palaran sendiri ketepatan waktu membayar pajak khususnya pajak bumi dan bangunan sudah cukup baik dari tahun sebelumnya terlihat dari antusiasme masyarakat dalam membayar pajak semenjak SPPT itu di terbitkan tetapi memang ada beberapa masyarakat yang di kecamatan palaran sering terlambat atau tidak membayar pajak di sebabkan mereka terkadang lupa cara membayar dan lupa bagaimana prosedur membayar pajak bumi dan bangunan sehingga mereka terkena denda sebesar 2 % dari ketentuan oleh pihak dispenda tetapi pihak dispenda selalu mengingatkan masyarakat agar tidak terlambat membayar pajak melalui sosialisasi baik media cetak maupun elektronik.

4.4.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Samarinda 2013-2015

Selama tahun 2013 hingga 2015 pihak dispenda selalu membuat kebijakan yang berbeda setiap tahunnya karena untuk menargetkan suatu pajak terutama pajak bumi dan bangunan harus berdasarkan potensi dan juga ekonomi dari masyarakat itu sendiri sehingga nantinya target yang di tetapkan oleh pihak dispenda bisa terealisasi secara maksimal sehingga dapat meningkatkan pendapat dan daerah dari sektor pajak bumi dan bangunan.

target dan realisasi dari pajak bumi dan bangunan memang tidak menentu pencapaiannya untuk tahun 2013 sendiri pihak dispenda hanya bisa mencapai target 90% dari target 22 miliar sementara untuk tahun 2014 pihak dispenda dapat melebihi target sekitar 110% dari target 30 miliar tetapi untuk tahun 2015 kemarin pihak dispenda mengalami banyak kendala sehingga sampai akhir tahun hanya bisa mencapai target sekitar 95% dari target 35 miliar, akan tetapi pihak dispenda selalu berusaha semaksimal mungkin agar selalu bisa mencapai target, jika memang sampai akhir tahun target belum juga tercapai pihak dispenda kota samarinda terus melakukan sosialisasi tentang waktu pembayaran PBB kepada wajib pajak yang belum membayar sehingga tidak terkena denda sebesar 2% tetapi memang itu kembali lagi kepada kedisiplinan dan tanggung jawab masyarakatnya sendiri

4.4.3 Faktor Penghambat

Partisipasi masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak khususnya pajak bumi dan bangunan di kecamatan palaran kota samarinda tidak terlepas dari adanya kendala atau penghambat yang membuat masyarakat tersebut selalu tidak tepat waktu dan juga terkadang masyarakat terlambat membayar pajak sehingga wajib pajak yang terlambat itu terkena denda dari pajak tersebut

Dalam partisipasi masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan di kecamatan palaran kota samarinda adalah yang menjadi faktor kendala atau penghambat adalah minimnya kesadaran ataupun tanggungjawab masyarakat yang di sebabkan oleh banyak faktor sehingga masyarakat tersebut selalu telambat ataupun tidak rutin membayar pajak bumi dan bangunan secara rutin sehingga mereka terkena denda sebesar 2% dari pajak tersebut adapun yang menjadi penghambat mereka membayar pajak tersebut adalah ketidaktahuan mereka tentang tatacara prosedur membayar pajak itu bagaimana atau karena mereka masih kurang paham pentingnya membayar pajak secara rutin setiap tahunya untuk membangun daerah mereka.

4.4.4 Faktor Pendukung

Yang menjadi faktor pendukung adalah dengan berkembangnya komunikasi serta teknologi dapat mempermudah bagi wajib pajak serta juga pihak dispenda dalam meningkatkan sosialisasi dengan menggunakan media cetak maupun elektronik sehingga dapat mempermudah wajib pajak yang tidak tau jadwal pembayaran pajak khususnya pajak bumi dan bangunan

Berkembangnya teknologi dan juga komunikasi dapat membantu pihak dispenda dalam hal sosialisasi melalui media cetak maupun elektronik serta juga pihak dispenda bekerjasama dengan bank kaltim dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan di kota samarinda bagi masyarakat yang mempunyai tempat tinggal jauh tidak perlu lagi datang ke kantor dispenda cukup membayar ke atm bank kaltim ataupun datang ke kantor cabang bank kaltim terdekat sehingga dapat mempermudah bagi masyarakat yang ingin membayar pajak bumi dan bangunan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Partisipasi Masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di kecamatan palaran kota samarinda , maka pada bab ini dapat diambil secara garis besar sebagai berikut :

1. Ketepatan waktu masyarakat di kecamatan palaran sendiri sudah cukup baik dari tahun sebelumnya terlihat dari antusiasme masyarakat dalam membayar pajak semenja SPPT itu di terbitkan tetapi memang ada beberapa wajib pajak di kecamatan palaran yang sering terlambat atau tidak tepat waktu membayar pajak kebanyakan di sebabkan karena mereka sering kali lupa kapan waktu membayar pajak bumi dan bangunan

sehingga mereka terkena denda yang sudah di tetapkan oleh pihak dispenda.

2. Target dan realisasi dari pajak bumi dan bangunan memang tidak menentu pencapaiannya untuk tahun 2013 sendiri pihak dispenda hanya bisa mencapai target 90% dari target 22 miliar sementara untuk tahun 2014 pihak dispenda dapat melebihi target sekitar 110% dari target 30 miliar tetapi untuk tahun 2015 kemarin pihak dispenda mengalami banyak kendala sehingga sampai akhir tahun hanya bisa mencapai target sekitar 95% dari target 35 miliar,
3. Adapun yang menjadi faktor penghambat adalah minimnya kesadaran ataupun tanggungjawab masyarakat yang di sebabkan oleh banyak faktor sehingga masyarakat tersebut selalu telambat ataupun tidak rutin membayar pajak bumi dan bangunan secara rutin sehingga mereka terkena denda sebesar 2% dari pajak tersebut adapun yang menjadi penghambat mereka membayar pajak tersebut adalah ketidaktahuan mereka tentang tatacara prosedur membayar pajak itu bagaimana atau karena mereka masih kurang paham pentingnya membayar pajak secara rutin setiap tahunnya untuk membangun daerah mereka.
4. Yang menjadi faktor pendukung adalah dengan berkembangnya teknologi dan juga komunikasi dapat membantu pihak dispenda dalam hal sosialisasi melalui media cetak maupun elektronik serta juga pihak dispenda bekerjasama dengan bank kaltim dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan di kota samarinda bagi masyarakat yang mempunyai tempat tinggal jauh tidak perlu lagi datang ke kantor dispenda cukup membayar ke atm bank kaltim ataupun datang ke kantor cabang bank kaltim terdekat sehingga dapat mempermudah bagi masyarakat yang ingin membayar pajak bumi dan bangunan.

5.2 Saran

1. Masyarakat harus dapat meningkatkan kesadaran serta tanggung jawab mereka dalam membayarpajak bumi dan bangunan secara rutin dan selalu tepat waktu setiap tahunnya karena dengan membayar pajak secara rutin masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan daerahnya khususnya untuk kota samarinda.
2. Dalam hal ini pihak dispenda kota samarinda selaku instansi yang bertanggung jawab dalam penerimaan pajak khususnya pajak bumi dan bangunan harus secara rutin memberikan sosialisasi waktu pembayaran pajak bumi dan bangunan serta memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak untuk pembangunan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Dwikora Harjo. 2013. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Mitra Wacana Media
Hessel, Nogi TAngkilisan. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: Gramedia.

- Isbandi, Rukminto Adi. 2007. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan*, Depok: FISIP UI Press.
- Kaho, Joseph Riwu. 1998. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*,
- Mardiasmo.2011.Perpajakan.Yogyakarta : CV Andi Offset
- _____. 2013.Perpajakan Edisi Revisi.Yogyakarta : CV Andi Offset
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- _____. 2013.*Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta.

Dokumen – Dokumen :

1. UU No.28 th 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah
2. Peraturan Daerah Kota Samarinda No.04 th 2011 Tentang Pajak Daerah
3. Target dan Realisasi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kota Samarinda 2013-2015